

MENGELOLA PERAN SERTA MASYARAKAT UNTUK PENINGKATAN KUALITAS HIDUP: PERENCANAAN PARTISIPATIF

Ida Ayu Sawitri Dian M¹⁾, Deasy Olivia²⁾, Harianto Hardjasaputra³⁾

^{1,2,3}Institut Sains dan Teknologi Pradita

*¹⁾ida.ayu@pradita.ac.id, ²⁾deasy.olivia@pradita.ac.id, ³⁾harianto.hardjasaputra@pradita.ac.id

ABSTRAK

Peran serta masyarakat dalam pembangunan di wilayahnya seringkali hanya sebatas upaya manipulasi. Manipulasi adalah tipologi terendah dari tingkat peran serta masyarakat, di mana tahapan tertingginya adalah *citizen control* yang diikuti dengan pelimpahan kekuasaan, kemitraan, perujukan, konsultasi, pemberian informasi, serta penyembuhan (Arnstain; 1969; 216-224). Tulisan ini mengambil fokus pada stimulasi peran serta masyarakat Kelurahan Keranggan di Tangerang, Banten, pada pembangunan wilayahnya melalui perencanaan partisipatif. Kelurahan Keranggan memiliki beragam industri olahan pangan yang berbasis industri rumah tangga, dengan produk utama berupa makanan ringan yang berasal dari singkong. Konsentrasi industri rumah tangga di Kelurahan Keranggan terletak di sekitar tepian Sungai Cisadane secara mengelompok pada RT 12 dan RT 13. Kondisi wilayah di RT 12 dan RT 13 Kelurahan Keranggan masih terbilang sulit akses dan orientasinya. Kecilnya akses ke rumah-rumah, dan terjalnya kontur wilayahnya, menyulitkan pengunjung untuk menemukan industri rumah tangga yang dituju. Alpanya informasi merupakan hal yang harus ditanggapi, apabila Keranggan ingin bersiap menjadi desa wisata. Dengan adanya informasi lokasi, akses, dan ragam industri rumah tangga yang ada, maka akan memudahkan pengunjung untuk datang ke industri-industri rumah tangga yang ada di Keranggan. Informasi yang paling efektif dalam hal tersebut adalah informasi peta. Pemetaan zona industri rumah tangga yang ada di Keranggan, menjadi titik awal proses perencanaan pembangunan dengan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat Keranggan dalam proses perencanaan, pengembangan, hingga pengelolaan program, merupakan faktor penting dalam keberhasilan usaha yang ada pada industri rumah tangga serta dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Keranggan.

Kata kunci: perencanaan; partisipasi masyarakat; pemetaan; industri rumah tangga

I. Pendahuluan

Pembangunan manusia di era global kian memperpanjang problematika kesenjangan yang terjadi di Indonesia. Begitu pesatnya seolah menengok ke bawah adalah tabu. Beberapa sektor bahkan tidak lagi melirik hasil karya masyarakat menengah ke bawah sebagai sumber produk pendukung usahanya. Upaya pabrikasi produk yang dikelola oleh masyarakat kelas menengah atas dinilai lebih mampu bersaing di pasar. Perhatian pemerintah pun pada industri kreatif, seringkali hanya menyorot pada sektor-sektor yang dapat diterima pasar dan pada subyek-subyek yang memiliki usaha serta kemampuan setengah matang.

Pembangunan manusia tidaklah dengan cepat dapat diwujudkan dari bantuan-bantuan yang sifatnya instan atau situasional. Hal tersebut seharusnya merupakan proses, yang sedikit demi sedikit mampu menyadarkan masyarakat untuk lepas dari keterpurukan. Seringkali bantuan

dalam hal pembangunan manusia hanya berupa bantuan kebutuhan sehari-hari seperti beras dan sembako, maupun bantuan dana yang plafon anggarannya hanya sekali.

Indeks pembangunan manusia menunjukkan bagaimana masyarakat dapat mengakses hasil pembangunan negara melalui perolehan pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Indeks pembangunan manusia ini diinisiasi oleh *United Nations Development Programme (UNDP)* dan dipublikasikan secara berkala kepada negara-negara berkembang. Indeks pembangunan manusia disingkat IPM, dinilai berdasarkan faktor umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar kelayakan hidup.

Tabel I.1 Indeks Pembangunan Manusia 2010-2017

Provinsi / Kabupaten / Kota	[Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
DKI JAKARTA	76.31	76.98	77.53	78.08	78.39	78.99	79.60	80.06
JAWA BARAT	66.15	66.67	67.32	68.25	68.80	69.50	70.05	70.69
BANTEN	67.54	68.22	68.92	69.47	69.89	70.27	70.96	71.42
BALI	70.10	70.87	71.62	72.09	72.48	73.27	73.65	74.30
NUSA TENGGARA BARAT	61.16	62.14	62.98	63.76	64.31	65.19	65.81	66.58
NUSA TENGGARA TIMUR	59.21	60.24	60.81	61.68	62.26	62.67	63.13	63.73
GORONTALO	62.65	63.48	64.16	64.70	65.17	65.86	66.29	67.01
MALUKU	64.27	64.75	65.43	66.09	66.74	67.05	67.60	68.19
MALUKU UTARA	62.79	63.19	63.93	64.78	65.18	65.91	66.63	67.20
PAPUA BARAT	59.60	59.90	60.30	60.91	61.28	61.73	62.21	62.99
PAPUA	54.45	55.01	55.55	56.25	56.75	57.25	58.05	59.09
INDONESIA	66.53	67.09	67.70	68.31	68.90	69.55	70.18	70.81

Sumber : Badan Pusat Statistik 2018

Tabel di atas merupakan rangkuman dari tabel indeks pembangunan nasional, di mana Indonesia memiliki nilai rata-rata 70,81. Kenaikan IPM dari tahun 2010 cukup memuaskan, di mana angka pembangunannya melonjak sebanyak 4,28 ditahun 2017. Tabel IPM di atas menampilkan bahwa Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara menduduki peringkat pertama IPM tertinggi yaitu 80,06 ditahun 2017 dengan kenaikan rata-rata dari tahun 2010 sebanyak 4,6. Angka IPM terendah masih juga didominasi oleh provinsi-provinsi yang berada di Indonesia timur, seperti Papua dan Papua Barat. Sedangkan Provinsi Banten yang terletak tepat berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta, justru memiliki IPM yang hampir menyamai rata-rata IPM nasional

yaitu diangka 71,42. Angka IPM Provinsi Banten masih berada dibawah angka IPM Provinsi Bali yaitu pada angka 74,30.

IPM provinsi di Indonesia timur masih terbilang rendah, di mana angkanya dominan di bawah angka rata-rata IPM nasional. Nusa Tenggara Barat memiliki angka IPM sebesar 66,58, di mana angka ini masih di bawah angka IPM rata-rata nasional dan provinsi-provinsi di Indonesia bagian barat. Meski IPM-nya masih berada di bawah rata-rata nasional, namun angka IPM Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami kenaikan yang cukup baik dari tahun 2010 yaitu sebesar 5,42. Kenaikan angka IPM-nya di atas Provinsi DKI Jakarta dan Banten.

Selain penyelenggaraan infrastruktur yang menjadi kunci peningkatan angka indeks pembangunan manusia, upaya pemberdayaan masyarakat adalah langkah yang harus ditempuh demi terwujudnya kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Pemberdayaan masyarakat adalah kunci keberhasilan pembangunan nasional serta pada dasarnya adalah upaya pemihakan, penyiapan, dan perlindungan untuk menjadikan rakyat berdaya (Sumodiningrat, 2016 Hal 95).

Salah satu cara yang dapat ditempuh dalam mengupayakan masyarakat agar berdaya adalah dengan mengikutsertakan masyarakat semenjak proses awal pembangunan. Partisipasi masyarakat merupakan awal yang baik dalam upaya pemberdayaan. Tentu saja upaya partisipasi tersebut juga melalui proses yang tidak mudah. Terdapat masyarakat yang acuh terhadap program-program pembangunan oleh pemerintah, ada pula masyarakat yang telah antipati terhadap program-program pembangunan tersebut.

Program pemberdayaan masyarakat harus dimulai sejak langkah yang paling awal yaitu langkah perencanaan. Langkah perencanaan dimulai dari proses-proses identifikasi dan pengenalan kawasan, koordinasi dengan perangkat desa, hingga pemetaan kegiatan.

II. Metode dan Langkah Pemberdayaan Masyarakat

Arnstein dalam penelitiannya di Amerika mengenai delapan tipologi peran serta masyarakat, menggambarkan bahwa proses peran serta masyarakat dimulai dari :

1. *Manipulation*

Manipulasi adalah tingkatan peran serta masyarakat yang paling rendah. Pada tingkatan ini masyarakat hanya ditempatkan sebagai anggota dan hanya dijadikan sebagai alat publikasi dari pihak penguasa.

2. *Therapy*

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap ini hanyalah usaha-usaha untuk mengubah pola pikir masyarakat, bukan untuk mendapatkan saran dan masukan dalam membuat program-program pengembangan.

3. *Informing*

Tahap ini merupakan tahap awal komunikasi dengan masyarakat, yaitu memberikan pengetahuan mengenai hak-hak, tanggung jawab dan pilihan-pilihan yang dapat diambil oleh masyarakat untuk mengembangkan diri.

4. *Consultation*

Langkah ini merupakan tahapan yang penting dilakukan dalam mencapai komunikasi dua arah dengan masyarakat, di mana masukan-masukan dari masyarakat menjadi ide program untuk pengembangan.

5. *Placation*

Penunjukan beberapa masyarakat yang berpengaruh dalam lingkungannya untuk menjadi badan-badan kerja. Sistem ini memungkinkan usulan-usulan masyarakat dapat dikemukakan dengan baik melalui perwakilannya.

6. *Partnership*

Adanya pembagian kekuasaan antara masyarakat dengan penginisiasi program. Keduanya menyepakati untuk saling berbagi tanggung jawab baik dalam proses perencanaan hingga pemecahan persoalan.

7. *Delegated power*

Dalam tahap ini masyarakat diberikan kewenangan untuk membuat keputusan / program sesuai dengan kebutuhannya. Masyarakat memiliki kewenangan penuh untuk membuat program-program pembangunan.

8. *Citizen control*

Pada tahap ini masyarakat dapat mengatur program, kelembagaan, dan kendali untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Masyarakat memiliki kewenangan penuh dalam setiap aspek program. Masyarakat secara mandiri dapat langsung berhubungan dengan pemegang dana.

Sebagai tahap awal dari proses pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, tahap *informing* merupakan tahap yang dapat dilakukan di lokasi terpilih. Pada tahap ini masyarakat diberikan pilihan-pilihan program untuk kemudian dapat dijadikan stimulan bagi program yang akan dilaksanakan. Selanjutnya tahap *consultation* menjadi tahapan penting yang akan dilakukan di lokasi terpilih.

Tahapan *informing* dimulai dengan membuat stimulan berupa pendataan industri rumah tangga yang ada di lokasi terpilih yaitu Kelurahan Keranggan. Pada tahap ini pula pendataan industri rumah tangga yang telah dilakukan kemudian diolah menjadi instrumen perencanaan berupa peta potensi industri rumah tangga Kelurahan Keranggan.

Pemetaan potensi industri rumah tangga di Kelurahan Keranggan selanjutnya menjadi titik awal untuk pembuatan program-program pengabdian kepada masyarakat dengan lebih terperinci sasaran dan lokasinya.

Metode yang digunakan pada pengabdian kepada masyarakat ini dimulai dengan penentuan lokasi pemetaan, dimana teridentifikasi bahwa terdapat konsentrasi industri rumah tangga yang tinggi di Kelurahan Keranggan kemudian dibuat delineaasi kawasannya melalui citra satelit. Dari delineaasi kawasan tersebut lalu dilakukan koordinasi dengan pihak kecamatan dan ditemukan bahwa RT 12 dan 13 adalah RT yang memiliki konsentrasi industri rumah tangga terbanyak. Selanjutnya adalah tahap pendataan, dimana dilakukan survei rumah-rumah yang memiliki industri rumah tangga dan siapa saja pemiliknya, bagaimana aksesnya, dan apa jenis usahanya. Semua informasi yang didapatkan dari proses diatas lalu diolah dalam bentuk grafis / peta yang menunjukkan tata letak dan sebaran industri rumah tangga lalu dicetak dalam berbagai bentuk dokumen, baik untuk sarana informasi maupun sarana promosi.

Peta ini dapat digunakan masyarakat untuk berbagai kegiatan, termasuk mempromosikan desa wisata industri rumah tangga yang ada di Kelurahan Keranggan. Dalam *monitoring* yang dilakukan oleh perangkat desa dan pemerintah setempat, peta dasar ini dapat pula digunakan sebagai dokumen dasar untuk menentukan pembangunan sarana prasarana di wilayah Kelurahan Keranggan.

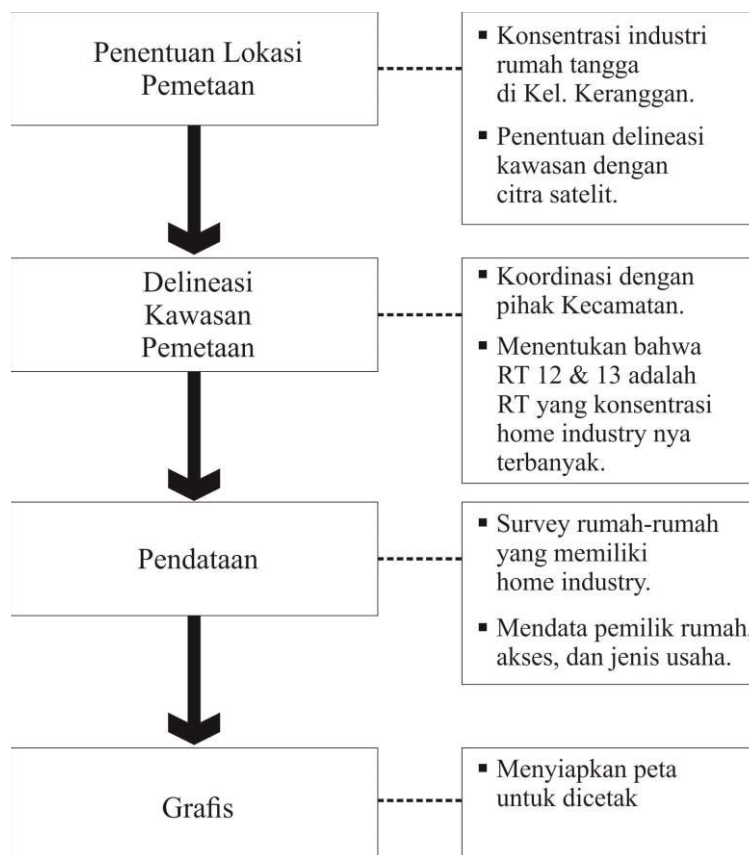


Diagram II.1 Metode Penyusunan Peta Potensi Kegiatan

III. Proses Perencanaan Partisipatif dalam Pengabdian Kepada Masyarakat

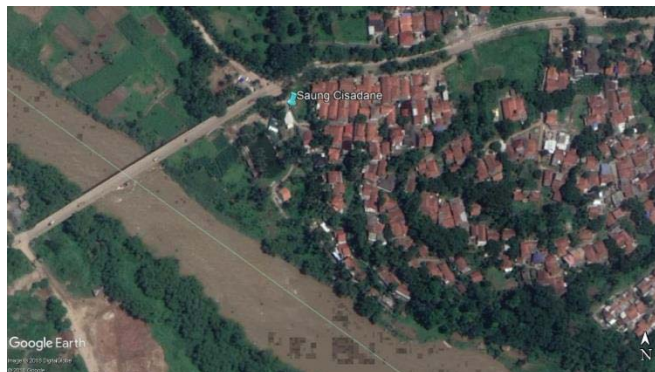
Kunjungan pertama dilakukan untuk melihat orientasi kondisi wilayah yang ada di Kelurahan Keranggan. Hasil dari kunjungan pertama yang telah dilakukan, mengerecut pada persoalan kerumitan akses dan sebaran industri rumah tangga yang terpencar.



Gambar III.1 Jalan-jalan sempit dan berliku di RT 12 dan 13 Keranggan

Sumber : Dokumentasi Pribadi

Hal-hal yang dilakukan pada proses pembuatan peta yang pertama adalah melakukan penentuan lokasi pemetaan dengan mendelineasi kawasan terpilih (yaitu RT 12 dan 13) dengan citra satelit.



Gambar III.2 Citra Satelit RT 12 dan 13 Kelurahan Keranggan

Sumber : Google Earth

Setelah menentukan delineasi kawasan dengan citra satelit kemudian dilakukan proses *tracing* sebagai dokumen pendukung survei. Proses *tracing* ini, kemudian menjadi dokumen survei yang digunakan oleh tim surveyor untuk mengidentifikasi kegiatan industri rumah tangga di RT 12 dan 13.



Gambar III.3 Peta *Tracing* Industri Rumah Tangga Keranggan

Sumber : Olah Pribadi

Peta *tracing* industri rumah tangga yang telah tercetak digunakan oleh mahasiswa dan tim dosen peneliti melakukan survei ke rumah-rumah yang memiliki industri rumah tangga. Mahasiswa dan tim dosen peneliti mendatangi satu per satu rumah yang memiliki industri rumah tangga dan melakukan pendataan mengenai jenis industri rumah tangga yang dimiliki masyarakat.



Gambar III.4 Proses Survei Ditemani oleh Perangkat Desa

Sumber : Dokumentasi Pribadi

Dalam proses tersebut, ditemukan bahwa industri rumah tangga yang dimiliki masyarakat semuanya merupakan industri makanan ringan. Industri makanan ringan tersebut diantaranya didominasi oleh industri opak, kemudian diikuti dengan industri keripik singkong, keripik pisang, kembang goyang, akar kelapa, dan enye.



Gambar III.5 Industri Rumah Tangga Keripik Singkong dan Opak di Keranggan

Sumber : Dokumentasi Pribadi

Selanjutnya dilakukan proses grafis untuk mendapatkan peta yang dibutuhkan. Setelah peta grafis setengah jadi kemudian dilakukan cek ulang di lapangan bersama dengan perangkat desa dan masyarakat yang terlibat didalamnya.

IV. Pemetaan Potensi Sebagai Langkah Awal Dalam Membangkitkan “Awareness”

Peta yang dihasilkan berupa peta garis, dimana terdapat informasi jaringan jalan, bentuk bangunan, dan jenis-jenis industri rumah tangga yang ada di Kelurahan Keranggan.



Gambar IV.1 Peta Zona Industri Rumah Tangga Kelurahan Keranggan

Sumber : Olah Pribadi

Dilakukan kodifikasi warna untuk tiap jenis industri rumah tangga dan bangunan yang memiliki industri rumah tangga diberi warna sesuai dengan kodenya. Selain itu, dilakukan kodifikasi dengan warna pada ruang-ruang usaha yang ada di RT 12 dan 13 yaitu berupa warung kelontong dan warung makan serta pedagang kebutuhan sehari-hari di Kelurahan Keranggan. Informasi yang dibutuhkan pengunjung, selain lokasi industri rumah tangga dan tempat istirahat (warung) adalah prasarana umum seperti tempat ibadah dan toilet umum. Dengan adanya informasi-informasi tersebut, pengunjung akan mudah menemukan fasilitas dan tujuan kunjungannya di industri rumah tangga tujuan, di Kelurahan Keranggan.

Peta yang telah dibuat, diharapkan dapat membantu memberikan informasi mengenai lokasi industri tertentu yang ingin dituju oleh konsumen maupun pengunjung lainnya. Selain itu, peta ini merupakan langkah awal Kelurahan Keranggan, untuk menyiapkan program utamanya sebagai desa wisata. Selanjutnya, peta ini dapat menjadi pedoman bagi perangkat desa untuk melakukan *monitoring*, sarana promosi, dan perencanaan program lainnya bagi masyarakat setempat.

V. Kesimpulan

Memulai upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan pada tahap *informing*, yaitu masyarakat diberi pilihan-pilihan serta stimulant untuk mengembangkan dirinya. Dalam hal ini, proses *informing* dilakukan melalui pembuatan peta zona industri rumah tangga di RT 12 dan 13, sebagai stimulant bagi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat desa maupun masyarakat setempat. Informasi terkait lokasi, akses, dan jenis industri yang ada, dapat diketahui lebih awal, melalui pemetaan yang telah dilakukan.

Keberlanjutan program tentu saja terbuka bagi semua pihak. Pada tahapan selanjutnya, disarankan untuk dapat dilakukan pembuatan sarana penanda, untuk memudahkan pengunjung yang datang menuju industri rumah tangga yang dituju.

VI. Daftar Pustaka

Panudju, Bambang. 2009. Pengadaan Perumahan Kota dengan Peran Serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah. P.T.Alumni : Bandung

Sumodiningrat, Gunawan dan Wulandari, Ari. 2016. Membangun Indonesia dari Desa. Media Presindo : Yogyakarta

Arnstein, Sherry. 1969. *A Ladder of Citizen Participation*, Journal of the American Institute of Planners 8.

Beeton, Sue. 2006. *Community Development through Tourism*. Landlinks Press : Victoria.